

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Hakikat pembangunan ekonomi adalah kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah melalui kuasa yang dimilikinya mengatur distribusi sumber daya secara adil dan wajar kepada masyarakat dengan semangat pelayanan. Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan mempunyai kewajiban membayar pajak kepada negara agar pemerintahan dapat berjalan dan kesejahteraan dapat tercapai. Relasi kuasa masyarakat dan pemerintah ini harus berjalan secara seimbang dan saling menghargai. Dalam berbagai momentum relasi kuasa ini tidak berjalan dengan baik. Oleh karenanya ilmu pembangunan ekonomi mencoba menjembatani kedua pihak dengan cara memberi solusi atas berbagai persoalan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran.

Salah satu peran pemerintah dalam mendorong kesejahteraan dan kemakmuran adalah peran alokatif. Dengan peran ini, pemerintah dapat mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada agar optimal dan efisien. Bentuk nyatanya adalah pemerintah mempunyai kewenangan besar dalam hal pengelolaan fiskal. Fiskal merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Sebagaimana diketahui bahwa cakupan fiskal ini sangat luas, maka apabila dikaitkan dengan penelitian ini maka fiskal yang dimaksud adalah pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Sementara

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dalam hal ini diarahkan pada parameter yang sudah menjadi parameter internasional dalam hal kesejahteraan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pendidikan merupakan sarana dalam menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Penyelenggaraan pendidikan di daerah terpencil akan mampu menjembatani kesenjangan budaya di masyarakat melalui budaya belajar di sekolah. Dalam dunia pendidikan terdapat indikator untuk mengukur tingkat kewajaran dalam proses belajar mengajar, yaitu dari perbandingan antara fasilitas pendidikan dengan fasilitas tenaga pengajar dan tenaga didik. Angka rasio ini digunakan untuk mengevaluasi pendidikan di Kota Langsa secara lebih terukur. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan di Kota Langsa setiap tahunnya selalu meningkat, ini menandakan bahwa pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan manusia yang tentunya akan berpengaruh pada pembangunan nasional dan berdampak positif bagi produktivitas maupun pertumbuhan ekonomi suatu daerah. (Sugiarto. dkk. 2013)

Pengeluaran sektor kesehatan dan sektor Pendidikan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam pengukuran IPM, kesehatan dan pendidikan adalah salah satu komponen utama selain pendapatan, karena Kesehatan serta pendidikan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dengan sumber daya manusia yang baik dan memadai maka pelaksanaan pembangunan akan semakin lancar dalam berbagai

sektor. Dibutuhkan kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan kualitas SDM. Pemerintah hendaknya memperhatikan hal tersebut terlebih jika memandang manusia merupakan subjek dan objek pembangunan, sehingga pembangunan manusia yang kemudian menunjang pembangunan di berbagai sektor akan mewujudkan kesejahteraan bagi manusia yang berada dalam wilayah pemerintahan tersebut. (Baiq, 2017)

Pendidikan dan Kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah. Menurut Meier dan Rauch (dalam Aloysius Gunadi Brata, 2004) pendidikan atau lebih luas lagi adalah modal manusia, dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Hal ini karena pendidikan pada dasarnya adalah bentuk dari tabungan, menyebabkan akumulasi modal manusia dan pertumbuhan *output agregat* jika modal manusia merupakan *input* dalam fungsi produksi *agregat*. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak. (Septiana, Dkk. 2015)

Pengeluaran pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan sangat erat kaitannya dengan indeks pembangunan manusia, semakin tinggi angka murid yang melanjutkan ke perguruan tinggi semakin besar peluang untuk memperoleh lapangan pekerjaan dan mempunyai keahlian sehingga berkurangnya angka pengangguran dan meningkatkan produktifitas serta mensejahterakan masyarakat. Secara umum, kualitas manusia di masing-masing kabupaten/kota di Kota Langsa yang diukur melalui IPM terlihat berfluktuasi dari tahun ke tahun. Daerah-daerah dengan IPM yang relatif tinggi mampu mempertahankan prestasinya (meskipun peringkatnya berfluktuasi).

Tabel 1.1
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengeluaran Pemerintah
Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan di Kota Langsa
Tahun 2012-2016

Tahun	IPM (%)	Perkembangan (%)	Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (Rupiah)	Perkembangan (%)	Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (Rupiah)	Perkembangan (%)
2012	72.75	-	166.213.622.899,00	-	37.080.034.243	-
2013	73.40	0.89	193.066.859.642,00	16.15	78.442.109.860	111,5
2014	73.81	0.55	236.508.852.231,54	22.50	119.123.967.083	51,8
2015	74.74	1.25	258.241.831.517,00	9.18	123.508.216.120	3,68
2016	75.41	0.89	245.738.692.432,31	-4.84	169.131.384.639	36,9

Sumber : Badan Pusat statistik (BPS), Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Langsa 2018.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan yang tertinggi di lihat pada tahun 2015 dengan jumlah 258.241.831.517,00 Rupiah. Dan Sektor Kesehatan tertinggi dilihat pada tahun 2016 dengan jumlah 169.131.384.639 Rupiah. Sedangkan Pengeluaran Pendidikan terendah pada tahun 2012 dengan jumlah 166.213.622.899,00 Rupiah. Dan Pengeluaran Sektor Kesehatan terendah dilihat pada tahun 2012 dengan jumlah 37.080.034.243 Rupiah. Jika dilihat dari perkembangannya, pada tahun 2014 Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan mengalami peningkatan sangat pesat yaitu 22.50%. dan Sektor Kesehatan pada tahun 2013 dengan nilai 111,5% . Sedangkan perkembangan yang mengalami penurunan sangat drastis pada tahun 2016 yaitu 4.84%. dan Sektor Kesehatan mengalami penurunan pada tahun 2015 dengan persentase 3,68. Penurunan nilai Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan disebabkan oleh adanya perpindahan alokasi dana pendidikan untuk tingkat SMA dan SMK ke tingkat Provinsi Aceh. Sedangkan Sektor Kesehatan mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini disebabkan banyaknya program kesehatan yang diadakan pemerintah untuk masyarakat terutama masyarakat kurang mampu dan lebih memprioritaskan kesehatan masyarakat.

Pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan 20% dari anggaran sektor pendidikan, dan 10% untuk sektor kesehatan, dan batas maksimal anggaran defisit 3,25% - 6,25% yang di sesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah. Dalam memenuhi jumlah alokasi minimal 20% dibidang pendidikan disebabkan oleh sejumlah dana yang masuk ke Kota seperti Bantuan Operasional Sekolah. BOS membiayai kebutuhan secara teratur dan cukup besar menutup ruang bagi

pemerintah untuk merealisasikan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, sebagai sumber dana untuk suatu kegiatan mungkin tidak tumpang tindih atau berlipat ganda. Ini berarti bahwa suatu kegiatan mungkin hanya didanai dari sumber tunggal, tapi tidak cukup. (Abdullah. dkk, 2016)

Pergerakan perubahan IPM dari tahun ke tahun juga dinilai sebagai indikasi yang menggambarkan perubahan pembangunan manusia di suatu wilayah. Hal ini merupakan indikator untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu periode. Perubahan IPM tersebut perlu dikaji karena keberhasilan pembangunan manusia tidak hanya diukur dari tingginya capaian angka IPM pada suatu waktu, akan tetapi juga melihat kecepatan dalam peningkatan IPM-nya. Dalam rangka mencapai nilai ideal IPM yaitu 100, tentunya dibutuhkan pertumbuhan IPM yang tinggi. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM nya semakin cepat nilai IPM yang ideal tercapai. Pertumbuhan IPM Kota Langsa tahun 2014 mencapai 0,55 % yang di nilai masih rendah terhadap perkembangan IPM pada tahun berikutnya, perkembangan IPM memuncak pada tahun 2015 yang mencapai 1,25 %. (BPS, 2018).

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Langsa”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka masalah yang dapat penulis rumuskan ialah sebagai berikut :

1. Apakah Pengeluaran Pemerintah sektor pendidikan berpengaruh secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Langsa ?
2. Apakah Pengeluaran Pemerintah sektor kesehatan berpengaruh secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Langsa ?
3. Apakah Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pengeluaran pemerintah Sektor Kesehatan berpengaruh secara Simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Langsa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Peneliti Bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Langsa.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan penelitian yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai informasi mengenai pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan di Kota Langsa
2. Dapat menambah wawasan penulis dalam hal perkembangan indeks pembangunan manusia

3. Sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama.